

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indikator kesuksesan suatu entitas bisnis dalam menghasilkan nilai ekonomi secara riil sering kali dicerminkan melalui nilai perusahaan. Bagi pemilik modal, nilai ini menjadi tolok ukur krusial sebelum memutuskan untuk menanamkan investasi pada sebuah korporasi (Dewi & Purnamawati, 2024). Evaluasi terhadap nilai perusahaan dapat dilakukan melalui berbagai instrumen keuangan, salah satunya lewat *Price Earning Ratio* (PER) yang merefleksikan penilaian pasar modal pada kesanggupan perusahaan untuk mendatangkan profit atau prospektif di masa mendatang (Seftiani & Masdiantini, 2024). Sebagai proksi strategis dalam penentuan investasi, *Price Earning Ratio* (PER) merepresentasikan salah satu fungsi esensial dari manajemen keuangan. Fungsi ini berkaitan langsung dengan efektivitas pengalokasian dana baik dari sumber internal maupun eksternal ke dalam berbagai instrumen investasi, dengan orientasi untuk mendatangkan tingkat pengembalian yang melampaui biaya modal (*cost of capital*) di masa depan. (Adeliani, 2020). Ekspektasi pasar terhadap akselerasi keuntungan di masa depan umumnya dicerminkan oleh tingginya angka *Price Earning Ratio* (PER) pada perusahaan yang memiliki proyeksi pertumbuhan pesat. Di sisi lain, entitas dengan ekspansi bisnis yang terbatas cenderung dicirikan oleh PER yang rendah. Bagi para pemodal, saham dengan rasio PER yang lebih rendah sering kali dinilai lebih kompetitif atau ekonomis untuk dijadikan instrumen investasi (Indarti & Nurdhiana, 2021).

Sektor perbankan berupaya menciptakan nilai tambah pada setiap aktivitas operasionalnya guna mendongkrak nilai perusahaan, yang pada akhirnya dapat memicu minat masyarakat untuk menciptakan modal atau aset mereka. (Seftiani & Masdiantini, 2024). Bank berfungsi sebagai motor pembangunan ekonomi melalui pengelolaan dana masyarakat yang terorganisasi. Selain mengoptimalkan sirkulasi modal, lembaga perbankan turut menghadirkan ragam layanan jasa penunjang untuk memenuhi kebutuhan finansial masyarakat, yang mencakup pengiriman uang, penyimpanan surat berharga, penjaminan komersial, dan penyelesaian kewajiban tagihan (Alifah, 2014). Ketidakmampuan bank dalam menjaga nilai perusahaannya dapat memicu kelangkaan likuiditas atau dana kelolaan, yang pada gilirannya akan mengikis kredibilitas bank di mata nasabah serta lembaga investor. Guna mengantisipasi dampak tersebut, bank dituntut untuk menyelaraskan seluruh aktivitas operasional demi mengeskalasi nilai perusahaan. Salah satu institusi perbankan yang mengimplementasikan peran ini secara nyata adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yang aktif memfasilitasi akses permodalan bagi masyarakat di wilayah pedesaan sekaligus memutus ketergantungan mereka pada praktik rentenir. (Seftiani & Masdiantini, 2024). Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terus menunjukkan peran penting dalam mendukung pertumbuhan sektor keuangan nasional, yang tercermin dari peningkatan aktivitas intermediasi selama tahun 2023. Berlandaskan pada dokumen Statistik Perbankan Indonesia (SPI) yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) edisi Desember 2023, penyaluran kredit BPR mengalami peningkatan tahunan sebesar 9,26% naik dari Rp 126.932 miliar pada Oktober 2022 menjadi Rp 138.694 miliar di bulan yang sama tahun berikutnya. Kinerja penghimpunan dana juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan

Dana Pihak Ketiga sebesar 9,66% dari Rp 123.684 miliar menjadi Rp 135.632 miliar sedangkan di balik pencapaian tersebut, pernah terdapat penurunan pada indikator laba tahun berjalan. Pada Oktober 2023, laba yang dibukukan oleh BPR tercatat sebesar Rp1,95 miliar, mengalami penurunan yaitu sebesar 22,98% lebih sedikit jika disandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya yang mencapai Rp2,53 miliar (Otoritas Jasa Keuangan, 2023). Penurunan yang terjadi ini tentunya mengindikasikan tekanan pada kinerja profitabilitas yang dapat berdampak pada nilai perusahaan di mata pemangku kepentingan.

Pada Provinsi Bali, Bank Perkreditan Rakyat mempunyai peran yang sangat strategis dalam mendorong perekonomian lokal. Keberadaan BPR di provinsi Bali berkontribusi dalam beberapa aspek penting, seperti penyediaan lapangan kerja, peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), penguatan sektor UMKM, serta pendorong peningkatan investasi. BPR di Bali tersebar di delapan kabupaten/kota, dan turut menopang struktur ekonomi daerah. Perlu diketahui bahwa Kabupaten Jembrana tidak termasuk kedalam sebaran tersebut karena sejak awal tidak terdapat Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang terdaftar OJK yang beroperasi di wilayah tersebut. Untuk menggambarkan perbandingan kinerja keuangan antar BPR yang ada di Provinsi Bali pada tahun 2024, maka berikut disajikan data laba/rugi tahun berjalan pada masing-masing kabupaten atau kota :

Tabel 1.1

Laba Rugi Tahun Berjalan BPR di Provinsi Bali Tahun 2024

No	BPR Provinsi Bali	Tahun 2024
1	Kabupaten Gianyar	62.676.491.827
2	Kabupaten Badung	54.650.481.184
3	Kabupaten Buleleng	23.825.702.871
4	Kabupaten Tabanan	13.511.482.209
5	Kabupaten Klungkung	8.245.004.783

6	Kabupaten Karangasem	4.482.631.189
7	Kabupaten Bangli	(2.066.157.801)
8	Kota Denpasar	(50.830.168.850)

(Sumber : Data diolah, 2025 dari situs resmi OJK)

Dari data yang diperoleh di atas, diketahui bahwa pada BPR di Kabupaten Buleleng merupakan BPR dengan perolehan laba tertinggi nomor tiga setelah Kabupaten Gianyar dan Kabupaten Badung. Meskipun nilai laba tersebut tergolong besar, peningkatan aktivitas intermediasi perbankan seperti penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) serta penyaluran kredit tidak selalu diikuti dengan peningkatan laba secara optimal. Secara teoretis, lonjakan Dana Pihak Ketiga (DPK) akan memperluas ruang bagi bank untuk mengoptimalkan alokasi kredit. Peningkatan volume penyaluran kredit ini berdampak positif pada penebalan pendapatan bunga, yang pada akhirnya berkontribusi langsung terhadap peningkatan profitabilitas bank (Citra et al., 2021). Namun pada praktiknya, peningkatan aktivitas intermediasi tersebut belum tentu diiringi dengan peningkatan laba karena adanya biaya operasional yang wajib ditanggung oleh bank. Oleh karena itu, efisiensi operasional merupakan faktor penting dalam menjaga stabilitas serta kapasitas entitas bisnis dalam mendapatkan keuntungan, yang selanjutnya mampu memengaruhi nilai perusahaan.

Selain faktor tersebut, tingkat ekonomi suatu daerah juga didukung dengan perkembangan jumlah UMKM di daerah tersebut. Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengemban peran yang sangat krusial dan strategis dalam memperkuat struktur perekonomian nasional (Maharani et al., 2025). Sejalan dengan hal tersebut Kabupaten Buleleng juga memiliki perkembangan jumlah

UMKM yang stabil di setiap periode. Berikut ini adalah data perkembangan UMKM pada tiap Kabupaten pada Provinsi Bali.

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah UMKM					
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Buleleng	31.653	34.552	35.555	54.489	57.216	66.368
2	Karangasem	38.989	39.589	40.468	57.456	40.614	50.717
3	Bangli	43.948	44.068	40.468	44.123	44.175	44.251
4	Badung	16.899	19.688	19.261	22.647	40.989	21.699
5	Gianyar	91.511	75.412	75.482	75.542	75.620	75.666
6	Denpasar	30.840	31.826	32.026	32.224	32.226	29.749
7	Tabanan	38.980	41.459	42.744	43.715	47.160	47.957
8	Jembrana	10.525	27.654	24.346	46.277	66.537	67.183
9	Klungkung	9.712	11.761	14.584	35.792	36.940	35.792

Gambar 1. Fluktuasi Kuantitas UMKM di Tingkat Kabupaten dan Kota se-
Provinsi Bali Periode 2018–2023

(Sumber : Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali, 2025)

Berdasarkan tabel tersebut, jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng menunjukkan pertumbuhan yang paling stabil dan signifikan setiap tahunnya. Peningkatan ini mencerminkan semakin aktifnya kegiatan ekonomi masyarakat, terutama di sektor perdagangan, jasa, dan industri rumah tangga. Kondisi tersebut juga menandakan meningkatnya kebutuhan akses pembiayaan dan layanan keuangan, khususnya bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Eksistensi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) menempati posisi strategis dalam arsitektur perbankan nasional berkat kontribusinya terhadap penguatan ekonomi. Berbeda dengan karakteristik bank umum, fokus operasional BPR diarahkan untuk mengakomodasi kebutuhan finansial pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM),

khususnya pada komunitas pedesaan. Melalui penyediaan instrumen keuangan yang simple seperti penghimpunan simpanan, deposito berjangka, serta pembiayaan kredit BPR mengemban misi utama untuk menstimulasi produktivitas ekonomi daerah sekaligus memperluas jangkauan inklusi keuangan (Malihah et al., 2024)

Dilihat dari beberapa faktor tersebut, maka wilayah Kabupaten Buleleng dipilih sebagai tempat penelitian dengan membatasi objek kajian pada BPR yang telah mengantongi izin resmi dari Otoritas Jasa Keuangan. Kabupaten Buleleng memiliki jumlah BPR Konvensional yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebanyak tujuh unit. Adapun ketujuh unit tersebut yaitu meliputi PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda), PT BPR Indra Candra, PT BPR Nusamba Kubutambahan, PT BPR Adi Jaya Mulia, PT BPR Nur Abadi, PT BPR Suryajaya Kubutambahan, dan PT BPR Kanaya.

Menurut Kasmir (2012:76) beberapa variabel fundamental yang memegang peranan penting dalam mengoptimalkan nilai perusahaan antara lain adalah rasio profitabilitas, ukuran perusahaan, pembiayaan struktur modal, dan tingkat likuiditas. Berdasarkan hal tersebut, peneliti memutuskan untuk melakukan pengukuran awal terhadap ketujuh BPR yang terdapat pada kabupaten Buleleng tersebut berdasarkan ROA, BOPO, dan LDR dan ditemukan adanya fenomena fluktuasi dari tahun 2020-2024. Hal tersebut diperhatikan pada tabel berikut

Tabel 1.2

ROA, BOPO, dan LDR pada BPR Kabupaten Buleleng

No	Nama BPR	Tahun	ROA	BOPO	LDR
1		2020	(0,77%)	152,01%	122,17%
		2021	0,19%	96,03%	120,40%

No	Nama BPR	Tahun	ROA	BOPO	LDR
	PT BPR Bank Buleleng 45 (Perseroda)	2022	0,11%	92,54%	140,47%
		2023	0,52%	90,97%	151,09%
		2024	-6,35%	98,36%	126,69%
2	PT. BPR Indra Candra	2020	1,63%	79,56%	64,64%
		2021	1,30%	81,34%	59,38%
		2022	1,41%	78,15%	57,72%
		2023	1,69%	76,17%	46,78%
		2024	1,23%	83,01%	39,40%
3	PT. BPR Nusamba Kubutambahan	2020	2,06%	86,46%	101,12%
		2021	1,50%	88,77%	97,30%
		2022	1,54%	89,17%	83,37%
		2023	1,59%	87,63%	78,33%
		2024	1,45%	87,84%	68,86%
4	PT. BPR Adi Jaya Mulia	2020	3,05%	61,09%	40,49%
		2021	(3,63%)	153,21%	201,33%
		2022	2,17%	77,69%	108,27%
		2023	1,72%	81,05%	78,37%
		2024	1,10%	88,63%	72,80%
5	PT. BPR Nur Abadi	2020	0,58%	89,68%	149,13%
		2021	0,14%	92,76%	127,15%
		2022	1,19%	83,19%	129,50%
		2023	(1,57%)	116,89%	102,93%
		2024	1,90%	80,50%	129,59%
6	PT. BPR Suryajaya Kubutambahan	2020	1,94%	84,02%	251,46%
		2021	(0,65%)	105,57%	208,09%
		2022	(1,08%)	112,47%	200,24%
		2023	0,40%	96,70%	157,25%
		2024	(1,65%)	113,93%	141,34%
7	PT. BPR Kanaya	2020	(4,18%)	137,81%	160,71%
		2021	(6,39%)	189,63%	132,54%
		2022	(5,67%)	186,99%	115,68%
		2023	(6,78%)	204,88%	115,69%
		2024	(12,75%)	293,15%	47,86%

(Sumber : Data diolah, 2025 dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan)

Pada tabel tersebut, terlihat jelas bahwa beberapa BPR mengalami fluktuasi.

Pada aspek profitabilitas terlihat bahwa beberapa BPR seperti PT. BPR Adi Jaya Mulia, PT BPR Suryajaya Kubutambahan dan PT. BPR Kanaya, mengalami perubahan yang tajam hingga mencatatkan nilai *negative* pada ROA di beberapa tahun. Hal tersebut mencerminkan bahwa terdapat ketidakstabilan dalam

menghasilkan laba bersih atas total asetnya. Nilai ROA *negative* menandakan ketidakmampuan manajemen mengelola aset secara optimal untuk menciptakan keuntungan, sehingga dapat menjadi sinyal *negative* terhadap perusahaan. Berbanding terbalik dengan BPR seperti PT BPR Indra Candra dan PT. BPR Nusamba Kubutambahan yang memperlihatkan kestabilannya dari tahun ke tahun yang mengindikasikan manajemen yang lebih efektif dalam memanfaatkan aset.

Efisiensi operasional yang tercermin melalui rasio BOPO, sebagian besar BPR di Kabupaten Buleleng menunjukkan nilai BOPO yang masih tinggi, dan bahkan beberapa di antaranya mencapai lebih dari 100% seperti yang terjadi pada PT. BPR Suryajaya Kubutambahan dan PT. BPR Kanaya. Tingginya BOPO tersebut menjadi tanda bahwa beban biaya operasional masih lebih besar dibanding pada pendapatan operasional yang diperoleh, dengan hal tersebut tentunya perusahaan dinilai kurang efisien. Ketidakefisienan ini dapat menurunkan laba, memperburuk kinerja operasional, dan akhirnya menurunkan nilai perusahaan di mata pemilik. Di sisi lain, BPR dengan rasio BOPO yang lebih rendah terdapat pada PT. BPR Indra Candra dan PT. BPR Adi Jaya Mulia yang menunjukkan kinerja operasional yang lebih efisien.

Rasio Likuiditas (LDR) pada beberapa BPR juga mengalami lonjakan yang sangat tinggi di atas 200%, seperti pada PT. BPR Suryajaya Kubutambahan pada 2020 dan 2021 yaitu sebesar 251,46% dan 208,09% selain itu terdapat juga pada PT. BPR Adi Jaya Mulia pada tahun 2021 yaitu sebesar 201,33% menunjukkan kondisi “Sangat Tidak Baik” menurut standar penilaian kesehatan bank (SE BI No. 6/23/DPNP/2004). LDR di atas 120% mencerminkan penyaluran kredit yang jauh melampaui kemampuan penghimpunan dana, sehingga risiko likuiditas menjadi

sangat tinggi. Kondisi tersebut dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, serta mengganggu stabilitas operasional, dan pada akhirnya menurunkan nilai perusahaan. Dengan demikian, LDR menjadi indikator yang sangat sensitif dan kritis bagi BPR, sehingga penting untuk diuji dalam penelitian.

Secara teoritis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori agensi. Berdasarkan teori agensi, dalam konteks manajemen bisnis, terdapat hubungan kontraktual antara suatu entitas (*principal*) dan seseorang atau kelompok (*agent*), dengan *principal* mendelegasikan kekuasaan manajerial kepada agen (Seftiani & Masdiantini, 2024). Dalam konteks ini, manajemen selaku agen mempunyai kewajiban dalam mengelola perusahaan untuk kepentingan (*principal*) atau pemilik. Namun, karena terdapat ketimpangan informasi, maka seringkali terjadi penyimpangan kepentingan. Berdasarkan hal tersebut, indikator kinerja yang meliputi profitabilitas, efisiensi operasional, dan likuiditas digunakan untuk mekanisme kontrol dan mengevaluasi sejauh mana agen dapat menjalankan perannya dengan efektif.

Berdasarkan hal tersebut, fokus kajian dalam penelitian akan menguji pengaruh variabel yaitu profitabilitas, efisiensi operasional, dan likuiditas. Pemilihan ketiga variabel tersebut dikarenakan secara teoritis dan praktis saling berkaitan dalam membentuk nilai perusahaan yang sehat serta berdasarkan pengukuran yang dilakukan sebelumnya juga ditemukan adanya fluktuasi yang bervariasi.

Faktor pertama yaitu profitabilitas, Besar kecilnya perolehan keuntungan ini menjadi cerminan dari kinerja keuangan korporasi yang diukur melalui total laba

bersih hasil operasional. (Resha Giviani, 2020). Keuntungan yang tinggi menjadi cerminan perusahaan baik. Hal ini berpotensi mendorong kenaikan harga saham perusahaan artinya, semakin superior tingkat keuntungan yang dihasilkan, maka semakin besar pula nilai pikat perusahaan bagi pemangku kepentingan. Prospek masa depan yang menjanjikan sering kali tecermin dari tingginya nilai pasar suatu perusahaan, yang dipicu oleh tingkat profitabilitas yang optimal. Para investor dan pemilik modal memandang profitabilitas sebagai tolak ukur awal dalam menilai kompetensi manajemen yakni dalam mengelola roda bisnis. Alur pemikiran ini selaras dengan konklusi ilmiah pada kajian terdahulu oleh Seftiani & Masdiantini (2024), Nurrahmawati *et al* (2020), Nopianti & Suparno (2021), Zakiah *et al* (2023) dan Gidus & Kurniawan (2025), yang mengonfirmasi bahwa tingkat profitabilitas memberikan kontribusi positif serta signifikan dalam mendongkrak nilai suatu korporasi. Fenomena ini tecermin dari adanya gap penelitian, di mana profitabilitas yang dinilai tidak menunjukkan pengaruh yang berarti bagi eksistensi perusahaan, seperti yang diidentifikasi melalui riset terdahulu oleh Wilyandi *et al* (2023).

Faktor kedua yaitu efisiensi operasional yang menjadi elemen penting dalam menentukan nilai suatu perusahaan. Dalam konteks perbankan, efisiensi operasional mencerminkan seberapa baik suatu bank dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya demi meraih pendapatan tertinggi dengan menekan pengeluaran sepeser mungkin. Pada aspek efisiensi operasional, instrumen ukur yang umum diaplikasikan adalah rasio BOPO, di mana penurunan angka rasio ini mengindikasikan semakin optimal pengelolaan yang dilakukan perusahaan. Efisiensi yang rendah yang ditunjukkan oleh tingginya BOPO menunjukkan bahwa perusahaan mengalami beban operasional yang besar yang dapat menggerus laba

bersih. Begitu pula sebaliknya, efisiensi operasional yang baik menjadi faktor bahwa perusahaan telah mampu mengendalikan biaya dan menciptakan profitabilitas yang lebih tinggi. Dengan demikian, efisiensi operasional berpotensi untuk memperkuat posisi kompetitif perusahaan serta memaksimalkan nilai korporasi. Sudut pandang ini selaras dengan arah kesimpulan dalam kajian ilmiah oleh Wildan & Yulianti (2021) dan Utami (2021) yang mengatakan bahwa efisiensi operasional berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Tetapi, hasil serupa tidak selalu diperoleh, karena terdapat pula hasil penelitian yang menunjukkan temuan bahwa efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap perusahaan, yaitu riset terdahulu oleh Wati et al.,(2021).

Faktor ketiga yaitu likuiditas yang merupakan indikator penting untuk menilai kemampuan jangka pendek suatu perusahaan. Dalam mengukur tingkat likuiditas perbankan, instrumen yang umum diaplikasikan adalah *Loan to Deposit Ratio* (LDR). Rasio ini merepresentasikan persentase atau sejauh mana dana Masyarakat yang dihimpun kemudian dialokasikan kembali dalam bentuk pembiayaan kredit. Rasio LDR yang tergolong sehat menunjukkan perusahaan mampu menyalurkan kredit dengan tetap menjaga keseimbangan likuiditasnya, sedangkan rasio yang tergolong tidak sehat yaitu ketika LDR terlalu tinggi yang bisa mengindikasikan potensi masalah likuiditas, sedangkan apabila terlalu rendah menunjukkan kurang optimal dalam penyaluran dana produktif. Hal tersebut searah pada penelitian yang dilakukan oleh Haryati *et al* (2024), Yanti & Darmayanti (2019), Wahyuni (2021), serta Rahma & Oktaviani (2024), yang mengkonfirmasi adanya kontribusi signifikan dari faktor likuiditas dalam menentukan nilai perusahaan. Namun, hasil serupa tidak selalu ditemukan, karena terdapat pula

sejumlah kajian empiris justru membuktikan bahwa aspek likuiditas tidak memberikan dampak nyata terhadap valuasi korporasi, sebagaimana yang dipaparkan dalam studi oleh Lumban Gaol (2023), Lumentur & Mangantar (2019)

Berdasarkan pemaparan tersebut maka dapat dikatakan lebih spesifik bahwa GAP penelitian ini terletak pada beberapa faktor yaitu 1) Terjadi penurunan pada indikator laba tahun berjalan pada Oktober 2023, 2) Adanya fenomena fluktuatif pada kinerja keuangan yang telah diuraikan pada tabel 2, 3) Perbedaan hasil penelitian sebelumnya yang sudah disampaikan pada bagian sebelumnya, baik dari sisi profitabilitas, efisiensi operasional, maupun likuiditas yang menunjukkan hasil yang beragam, mulai dari pengaruh positif, negatif, hingga tidak signifikan menunjukkan belum adanya kesimpulan yang konklusif terkait dengan pengaruh ketiga variabel tersebut terhadap nilai perusahaan, 4) Kurangnya studi yang menguji ketiga variabel tersebut, khususnya pada konteks Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Buleleng yang memperkuat urgensi untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Namun, *research* GAP dalam penelitian ini tidak semata-mata didasarkan pada perbedaan hasil penelitian terdahulu, melainkan terletak pada ketidaksesuaian variabel sebelumnya dengan karakteristik operasional Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Seftiani & Masdiantini (2024) memang telah menguji nilai perusahaan pada BPR di Kabupaten Buleleng, tapi masih menggunakan variabel independent yang mengadopsi pendekatan umum perusahaan publik, yaitu struktur modal dan pertumbuhan perusahaan. Terlebih, BPR merupakan lembaga keuangan non-publik yang tidak menghimpun dana

melalui pasar modal dan mempunyai karakteristik intermediasi yang sangat bergantung pada efisiensi operasional dan kemampuan menjaga likuiditasnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka *research gap* penelitian ini juga terletak pada kebutuhan untuk menguji kembali faktor-faktor yang secara substantif dapat lebih mencerminkan risiko serta kinerja utama BPR, yakni efisiensi operasional (BOPO), dan likuiditas (LDR) yang belum diuji secara komprehensif pada konteks BPR Kabupaten Buleleng periode 2020-2024.

Alasan pemilihan tahun pengamatan tersebut yaitu karena periode atau tahun tersebut mencerminkan fase penting dalam stabilitas usaha BPR, yaitu masa pandemi hingga pasca-pandemi COVID-19. Tahun 2020 merupakan awal terjadinya tekanan besar pada sektor keuangan akibat pandemi, sedangkan tahun-tahun berikutnya menunjukkan upaya pemulihan dan penyesuaian BPR terhadap kondisi ekonomi baru, pemilihan rentang waktu lima tahun ini juga didasarkan pada ketersediaan data sekunder yang lengkap dan konsisten dari OJK serta BPS, sehingga mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai tren profitabilitas, efisiensi operasional, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan BPR.

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dipaparkan menyatakan bahwa tidak semua variabel keuangan seperti struktur modal dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut mendorong perlunya pengujian ulang dengan variabel-variabel alternatif yang lebih relevan dan sesuai dengan karakteristik BPR. Dengan demikian, peneliti mengasumsikan perlu adanya penelitian lebih jauh untuk mengungkap variabel-variabel apa saja yang sekiranya mempengaruhi nilai perusahaan pada BPR di Kabupaten Buleleng.

Penggantian variabel struktur modal dan pertumbuhan perusahaan dengan rasio efisiensi operasional (BOPO) dan likuiditas (LDR) didasarkan dengan pertimbangan konseptual serta karakteristik institusional dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Pada umumnya struktur modal lebih sesuai bagi perusahaan publik yang mempunyai akses pendanaan melalui penerbitan saham atau obligasi. Sedangkan, BPR bukan merupakan perusahaan yang terdaftar di pasar modal dan struktur permodalannya relatif terbatas dan diatur oleh ketentuan modal inti regulator, sehingga variabel struktur modal menjadi kurang variatif dan representative untuk menjelaskan nilai perusahaan.

Selain itu, pertumbuhan perusahaan yang diukur melalui pertumbuhan aset juga belum tentu mencerminkan kinerja BPR. Pertumbuhan aset yang tinggi tanpa diimbangi dengan efisiensi operasional serta pengelolaan likuiditas yang baik justru akan dapat meningkatkan risiko. Pada konteks BPR yang sumber dananya lebih besar berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dan aktivitas utamanya berfokus kepada fungsi intermediasi, efisiensi pengelolaan biaya operasional dan kemampuan penyaluran kredit secara optimal menjadi faktor yang lebih menentukan keberlanjutan usaha.

Sedangkan, BOPO dapat mencerminkan kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya operasional, dan LDR dapat menggambarkan keseimbangan antara penghimpunan dana serta penyaluran kredit. Sehingga, kedua rasio tersebut dapat berkaitan langsung dengan stabilitas, risiko, dan keberlanjutan usaha BPR, sehingga lebih relevan dalam menjelaskan nilai perusahaan dibandingkan struktur modal serta pertumbuhan aset di BPR. Berbagai faktor tersebut melandasi keputusan peneliti untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut. Adapun judul yang

diangkat dalam riset ini adalah “Pengaruh Profitabilitas, Efisiensi Operasional, dan Likuiditas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi pada Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Buleleng Tahun 2020–2024)”

1.2 Identifikasi Masalah

Guna menjawab permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka fokus utama penelitian ini dirumuskan sebagai berikut..:

1. Penurunan laba pada indikator laba tahun berjalan
2. Terjadinya fluktuasi terhadap profitabilitas, efisiensi operasional, dan likuiditas pada BPR selama periode 2020-2024
3. Efisiensi operasional yang diukur dengan BOPO masih tergolong tinggi, menunjukkan bahwa pengelolaan biaya operasional belum efisien.
4. Beberapa BPR menunjukkan variasi besar yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan.
5. Belum diketahui secara pasti bagaimana hubungan antara profitabilitas, efisiensi operasional, dan likuiditas terhadap nilai perusahaan pada BPR di Buleleng.

1.3 Pembatasan Masalah

Demi mewujudkan analisis yang lebih spesifik dan mendalam, penulis menerapkan batasan masalah yang difokuskan pada poin-poin berikut:

1. Penelitian hanya dilakukan pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Konvensional Kabupaten Buleleng yang ada pada Otoritas Jasa Keuangan selama periode tahun 2020–2024.

2. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Nilai Perusahaan, yang dalam konteks BPR non-publik diproksikan menggunakan rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) : Laba Setelah Pajak.
3. Variabel bebas yang digunakan terbatas pada profitabilitas (ROA), efisiensi operasional (BOPO), dan likuiditas (LDR).
4. Laporan keuangan tahunan BPR digunakan sebagai basis data sekunder dalam penelitian ini, yang diperoleh secara legal melalui kanal informasi publik OJK maupun platform digital resmi milik BPR terkaitS.

1.4 Rumusan Masalah

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada BPR di Kabupaten Buleleng
2. Apakah efisiensi operasional berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada BPR di Kabupaten Buleleng
3. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada BPR di Kabupaten Buleleng

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap nilai perusahaan pada BPR di Kabupaten Buleleng
2. Untuk menganalisis pengaruh efisiensi operasional terhadap nilai perusahaan pada BPR di Kabupaten Buleleng
3. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap nilai Perusahaan pada BPR di Kabupaten Buleleng

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat penerapan teori keagenan dalam konteks lembaga keuangan non-publik seperti BPR, dan memberikan bukti empiris bahwa variabel yang diujikan yaitu profitabilitas, efisiensi operasional, dan likuiditas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dalam teori keagenan, hasil penelitian ini akan memperkuat pemahaman mengenai peran manajemen dalam mengelola perusahaan untuk meningkatkan nilai bagi pemilik. Secara teoritis, temuan riset ini berkontribusi dalam memperluas khazanah literatur di bidang akuntansi serta manajemen keuangan, utamanya yang berkaitan dengan determinan internal pemicu nilai perusahaan di pada perbankan mikro. Selain itu, karya ilmiah ini diharapkan dapat memperjelas rujukan empiris bagi studi futuristik dengan topik sejenis

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan memberikan informasi tambahan dan terkait dengan berbagai variabel yang diteliti, guna dijadikan sebagai acuan penilaian bagi BPR di kawasan Kabupaten Buleleng serta dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan praktik manajerial yang lebih efisien di lingkungan BPR. Melalui hasil analisis profitabilitas (ROA), BPR dapat menilai seberapa efektif aset digunakan untuk menghasilkan laba. Melalui efisiensi operasional (BOPO), manajemen dapat meninjau sejauh mana biaya operasional dapat ditekan tanpa mengganggu produktivitas. Melalui likuiditas (LDR), BPR dapat menjaga keselarasan diantara penyaluran kredit dan penghimpunan DPK, agar tetap sehat dan stabil. Secara keseluruhan, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi

strategis bagi BPR untuk meningkatkan daya saing, mempertahankan kepercayaan masyarakat, serta menjaga kesinambungan usaha ditengah dinamika ekonomi daerah.

b. Bagi Peneliti

Melalui kajian ini, peneliti memperoleh ruang untuk mengimplementasikan serta menguji relevansi teori-teori ilmiah yang telah dipelajari selama menempuh pendidikan di bangku kuliah, selain itu, peneliti juga memperoleh pemahaman langsung mengenai kondisi nyata yang relevan dengan topik yang dikaji.

c. Bagi Akademisi

Penelitian dapat menjadi tambahan literatur yang memperkaya kajian ilmiah di bidang akuntansi serta memberikan wawasan yang lebih luas pada masa yang akan datang dan menjadi tambahan kepustakaan. Temuan dalam studi ini tidak hanya berfungsi sebagai proksi referensi bagi agenda riset lanjutan bertema serupa, melainkan juga sebagai instrumen edukasi untuk para akademisi. Khususnya bagi mahasiswa, studi ini diharapkan bisa memperjelas konseptualisasi mengenai dampak parsial dari profitabilitas, efisiensi operasional, dan likuiditas dalam menentukan nilai perusahaan BPR.

d. Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Melaui studi ini diharapkan bisa memberi kontribusi dalam bentuk karya ilmiah yang memperkuat reputasi akademik bagi Universitas Pendidikan Ganesha, khususnya dalam bidang penelitian dan pengabdian masyarakat. Selain itu, hasil dari kajian studi ini juga mampu dijadikan sebagai salah satu sumber pustaka yang bermanfaat bagi sivitas akademika dalam pengembangan keilmuan serta penelitian sejenis yang diperlukan di masa mendatang.